

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Harahap Yahya, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Hernoko Agus Yahya, *Hukum Perjanjian*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
- Husni Lulu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, visimedia, Jakarta 2016
- Jehani Libertus, *Hak-hak Pekerja Bila di PHK*, Visimedia, Jakarta, 2006
- Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1994
- Soepomo Imam, *Hubungan Kerdja*, P.P.A.K.R.I. Bhayangkara, Djakarta, 1968
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1965
- Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, 2015

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No: 3989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 3941)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 1227)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Swasta (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor : 2686)
- Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor : 88)
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan sementara Pengadilan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor : 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor : 81)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 5076)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4358)
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 3316)

C. KEPUTUSAN PRESIDEN

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

D. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

E. PERATURAN MENTERI

Kepmen Naker Trans Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT

Kepmen Naker Trans Nomor 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah

F. INTERNET

Deny Septian, "Ini 3 Faktor penyebab demo buruh", <http://bisnis.liputan6.com/read/2306683/ini-3-faktor-penyebab-demo-buruh>, pada tanggal 9/29/2017

Fiki Ariyati, "Banyak PHK Jumlah Pengangguran jadi 7,56 orang", <http://bisnis.liputan6.com/read/2358091/banyak-phk-jumlah-pengangguran-jadi-756-juta-orang>, pada tanggal 9/29/2017

Gara Ambrosius, "Penerapan asas peradilan cepat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7635>, 10/3/2017

Hairiri Prianter Jaya, "Antara faktor prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan pembatasan perkara kasasi", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/190/0>, pada tanggal 03/10/2017

Hendra Kusuma <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3488342/buruh-tak-ingin-ada-phk-karena-robotisasi>

Invesment Indonesia, "angka ekonomi makro", <https://www.indonesia.investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255>, pada tanggal 9/29/2017

Kompasiana, "Konflik Perusahaan", http://www.kompasiana.com/chynsa_afryzar/konflik-perusahaan_54f96be6a33311f1068b4ef7, pada tanggal 9/29/2017



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

AZAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NASKAH PUBLIKASI

Muhammad RAMAYANI DARWISa Hariyanto, S.H.,M.H. Hubungan Industri”,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

<http://www.hubunganindustri.com/2016/10/01/sejarah-hubungan-industri/#more-10>, pada tanggal 10/2/2017

- Maswandi, “IMPLEMENTASI PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA”,
https://www.google.co.id/search?q=4.+Implementasi+Prinsip+cepat%2C+sederhana+dan+biaya+ringan+dalam+penyelesaian+sengketa+hubungan+indusrial+di+Indonesia&rlz=1C1AVFB_enID745ID745&oq=4.+Implementasi+Prinsip+cepat%2C+sederhana+dan+biaya+ringan+dalam+penyelesaian+sengketa+hubungan+indusrial+di+Indonesia&aqs=chrome..69i57.2361j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 10/3/2017
- Mohammad Amir Hamzah, Tolok Ukur Hukum Sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan Perdata,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433538&val=7697&title=Tolok%20Ukur%20Prinsip%20Hukum%20Sederhana,%20Cepat%20dan%20Biaya%20Ringan%20pada%20Peradilan%20Perdata>, diakses pada tanggal 21/02/2018 jam 16:09
- Mosgan Situmorang, S.H.,M.H., Penyederhanaan Proses Peradilan,
http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_penyelerhanaan_proses_peradilan.pdf, diakses pada tanggal 22/2/2018 jam 9:42
- Okezone <https://metro.sindonews.com/read/1083310/170/demo-di-istana-buruh-tolak-upah-murah-dan-phk-massal-145473934>, diakses pada tanggal 23/3/2018 jam 14:50
- Rosita Dede, “Hukum Kepegawaian”, Sengketa Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil,
https://www.academia.edu/32365773/HUKUM_KEPEGAWAIAN_SENGKETA_KEPEGAWAIAN_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL, pada tanggal 2/09/2017
- SOD, Hari ini demo di depan Grahadi, buruh menuntut PT. Unilever tak PHK karyawan,
<https://duta.co/hari-ini-demo-di-depan-grahadi-buruh-tuntut-pt-unilever-tak-phk-karyawan/> diakses pada tanggal 23/3/2018 jam 15:05